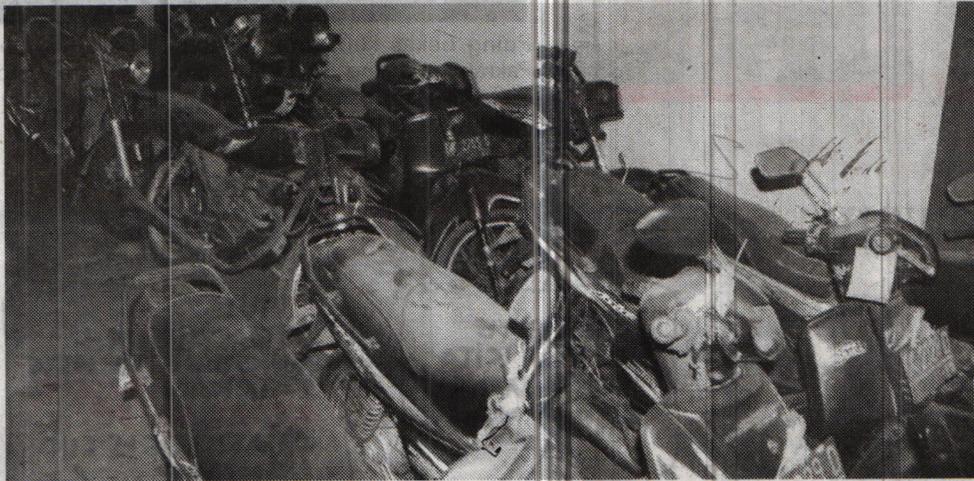




Motor Operasional Teronggok di Basement DPRD Badung



SEJUMLAH motor yang lama tak terpakai, kondisinya tak terawat dan berjejer di basement gedung DPRD Badung, Senin (26/10).

• NUSABALIARI SISWANTO

MANGUPURA, NusaBali

Belasan unit motor teronggok di basement kantor DPRD Badung, Sempidi, Kecamatan Mengwi. Walaupun secara kasat mata kondisinya cukup mulus, namun motor tersebut sudah tak terpakai. Saking lamanya tak digunakan, motor-motor ini jadi berdebu dan tampak sangat kotor. Anehnya lembaga dewan berkilah bila sedang dalam proses pelelangan.

Adapun merek motor yang terbelengkalai seperti Honda GL Pro, Mega Pro, Astrea Grand, dan Honda Supra. Motor disebut-sebut adalah kendaraan operasional staf sekretariat dewan. Secara fisik ada nomor

polisi (nopol) yang sudah dalam keadaan kadaluwarsa. Tapi ada juga yang masih berlaku hingga November 2015.

Sekretaris DPRD (Sekwan) Badung Made Wira Dharmajaya tak menampik atas kondisi tersebut. Mesmi begitu dia membantah bila ada unsur kesengajaan. Mengingat kendaraan lama tak terpakai karena akan dihapuskan. Menurutnya sekarang menunggu proses lelang di Bagian Aset Pemkab Badung.

"Coba tanyakan ke Bagian Aset. Di sana yang memproses pelelangan," kata Wira Dharmajaya, saat dikonfirmasi, Senin (26/10).

Berapa jumlah kendaraan ope-

rasional yang akan dilelang? Mantan Asisten III Pemkab Badung ini mengaku tak hafal. "Data saya lupa. Mohon maaf saya sedang tidak enak badan," ucapnya. Dan untuk taksiran nilai aset pihaknya pun mengaku tak tahu.

Sementara itu Kabag Aset Pemkab Badung I Wayan Puja tak banyak memberikan komentar atas lelang kendaraan operasional di lingkungan Pemkab Badung, salah satunya yang ada di sekretariat dewan. Diminta perincian lelang kendaraan plat merah itu, pihaknya berdalih tak memegang data. "Datanya dipegang staf," ucap mantan Camat Kuta Selatan, itu. **as**

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal : 2



Pengelolaan Tak Jelas, Pasar di Eks Rutan Bangli Disorot



● NUSABALI/DEWA

KONDISI Pasar yang berdiri di eks Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bangli, di kawasan Jalan Serma Meranggi, Senin (26/10).

BANGLI, NusaBali

Pengelolaan pasar yang berdiri di eks Rumah Tahanan Negara (Rutan) Bangli, tepatnya di kawasan Jalan Serma Meranggi, sampai saat ini keberadaannya belum jelas alias saru gremeng. Padahal pasar ini telah didirikan sejak tahun 2009, dengan menggunakan bantuan Kementerian Koperasi dan UKM RI. Sehingga ketidakjelasan pengelola pasar ini, mendapat sorotan dari banyak pihak diantaranya anggota DPRD Bangli

Anggota DPRD Bangli, I Nengah Reken, saat dikonfirmasi mengenai keberadaan pasar tersebut, menjelaskan berdasarkan informasi yang didapatnya, sesuai dengan mekanisme seharusnya pasar ini dikelola oleh koperasi, yang notabene anggotanya adalah pedagang setempat. "Namun, hingga kini kita belum tahu koperasi mana yang mengelola pasar tersebut," tanya politisi Partai Golkar, Senin (26/10).

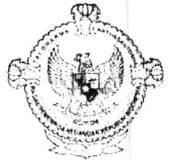
Dia juga menyinggung soal kewajiban pedagang yang menempati kios. Sebab sejauh ini belum ada yang mengatur, meski mereka membayar retribusi. "Jadi, persoalan itu harus benar-benar jelas," pintanya.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Bangli, I Dewa Gede Supartha, dikonfirmasi terpisah, membenarkan sejauh ini memang belum ada pihak yang ditunjuk menjadi pengelola pasar tersebut. "Sampai saat ini pasar tersebut masih dinaungi Pemkab," sebutnya.

Kata dia, pasar dengan beberapa los dan kios itu dibangun pada tahun 2009 dengan menggunakan anggaran stimulus dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI. Pembangunan menelan dana hingga Rp 1 Miliar. "Untuk langkah selanjutnya, kita bakal segera melakukan kajian, terkait dengan pengelola pasar tersebut," imbuhnya. **cr53**

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal : 8



Pungutan Pajak Hotel Restoran.

Dimasalahkan

★ Oknum Pol PP Dituding Lindungi Hotel Bodong

Memungut PHR dari akomodasi wisata yang bodong, Dispenda dituding ikut melegalkan usaha tersebut. Padahal, usaha itu tanpa IMB dan izin usahanya.

SINGARAJA, NusaBali

Pungutan pajak hotel dan restoran (PHR) terhadap akomodasi seperti hotel, vila dan pondok wisata yang tidak berizin, kini dimasalahkan oleh Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng. Pungutan tersebut dianggap sebagai tindakan ikut melegalkan

usaha akomodasi yang tidak berizin tersebut.

"Kami sangat apresiasi atas usaha-usaha dari Dinas Pendapatan untuk meningkatkan PAD. Tapi kalau memungut PHR dari hotel, vila dan pondok wisata yang tidak memiliki izin, itu sama artinya Dispenda ikut melegalkan usaha tersebut. Padahal sudah jelas-jelas, usaha itu tidak memiliki IMB, bahkan izin usahanya saja belum ada," ungkap anggota Bangar, Putu Mangku Budiasa dalam pembahasan rancangan APBD induk 2016 bersama tim anggaran eksekutif, Senin (26/10).

Mangku Budiasa menyebut, pihaknya menemukan masih ada sarana akomodasi yang belum berizin, tapi sudah beroperasi. Nah, kalau sarana akomodasi itu terus dipungut pajak, Mangku Budiasa khawatir justru tindakan itu akan memunculkan

persoalan baru di kemudian hari.

"Saya khawatir ini (pungutan PHR terhadap hotel, vila dan pondok wisata, red) akan timbulkan masalah baru kedepannya, jangan sampai pungutan itu dikatakan pungli. Ini perlu mendapat perhatian serius," ujarnya.

Politisi PDIP asal Desa Selat, Kecamatan Sukasada ini juga menyinggung tindakan dari Satpol PP Pemkab Buleleng yang tidak peka terhadap keberadaan sarana akomodasi yang tidak berizin. Disebutkan, dirinya pernah memberikan data yang akurat terhadap pondok wisata yang tidak berizin tapi sudah beroperasi kepada Satpol PP, ternyata sampai sekarang tidak ada tindakan tegas.

"Kami berapa kali sidak, ternyata memang pemilik pondok wisata tidak mau punya itikad baik mengurus perizinan, tapi

anehnya Pol PP yang saya berikan data juga tidak ada responnya. Dan katanya pondok wisata itu dilindungi oleh oknum Pol PP sendiri," ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga meminta kepada Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka, mengevaluasi kinerja Badan Polisi Pamong Praja. Perbuatan oknum yang melindungi usaha bodong, dianggap sudah jelas-jelas merugikan daerah. Selain itu kinerja tim yustisi, kata Mangku, juga patut dievaluasi kembali. Karena tak kunjung menginjak hotel bodong yang telah disampaikan oleh dewan.

Sementara itu Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka secara terpisah menyatakan mengapresiasi informasi yang disampaikan DPRD Buleleng. Puspaka juga menyinggung perwakilan dari Dispenda yang menyebut, PHR yang dipungut adalah pajak dari

wisatawan yang dititip sementara kepada pengelola sarana akomodasi. Kendati demikian, pihaknya akan menindak tegas terhadap sarana akomodasi yang belum berizin.

Sedangkan terkait dengan dugaan oknum Pol PP yang ikut melindungi sarana akomodasi yang tidak berizin, Puspaka menjamin tim yustisi telah melakukan langkah-langkah, dan menegaskan pemerintah tak akan membiarkan ada usaha bodong di Buleleng.

"Terkait masukan ada oknum yang jadi backing, ini dapat menjadi referensi kami. Saya tegaskan, sebagai pejabat yang berwenang mengevaluasi masalah kepegawain, ini akan menjadi perhatian saya. Kami tidak ingin aparat pemerintah menyalahgunakan jabatannya, dengan menjadi backing usaha yang tidak berizin," tegasnya. ☎ k19



Reses, Dewan Ditohok Bansos

DENPASAR, NusaBali

Ketidakpastian cairnya dana bantuan sosial (bansos)/hibah untuk masyarakat yang difasilitasi DPRD Bali, akhirnya jadi beban bagi 55 anggota Dewan. Saat terjun ke masing-masing daerah pemilihan (Dapil)-nya untuk penyerapan aspirasi saat masa reses, Senin (26/10), para anggota Dewan mulai ditohok masalah bansos.

Masyarakat mulai menanyakan kepastian pencairan bansos ini, hingga anggota Dewan pun terpaksa harus menjelaskan ulang duduk persoalannya. Salah satu yang mengaku ditohok masalah bansos adalah anggota Komisi IV DPRD Bali dari Fraksi Golkar Dapil Badung, I Wayan Rawan Atmaja.

"Ya, masyarakat sudah bertanya-tanya soal pencairan bansos ini. Kita reses, di mana-mana masalah bansos/hibah jadi topik masyarakat," ujar Rawan Atmaja kepada *NusaBali*, Senin kemarin.

Karena tidak mau masyarakat yang diwakilinya di Badung kecewa, maka

Bersambung ke Hal-15 Kolom 1

Reses, Dewan Ditohok Bansos

SAMBUNGAN DARI HALAMAN 1

Rawan Atmaja pun berusaha menjelaskan duduk persoalan. Dia tak ingin persoalan bansos malah jadi bumerang.

"Dari A sampai Z kami jelaskan ulang, supaya masyarakat mengerti dan informasinya tidak simpangsiur. Kita sampaikan memang ada perubahan aturan (di mana penerima bansos harus berbadan hukum, Red)," jelas politisi Golkar asal Banjar Bualu, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kutá Selatan, Badung ini.

Rawan Atmaja mengatakan, selain masalah bansos/hibah, berbagai persoalan juga diserap selama sepekan masa reses DPRD Bali. Termasuk di antaranya menyangkut masalah infrastruktur, program pendidikan, dan kesehatan. "Tapi, yang mendominasi adalah pertanyaan soal bansos," ujar Ketua Pansus Rencana Induk Pembangunan Pariwisata DPRD Bali ini.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi PDIP DPRD Bali Dapil Buleleng, Ketua Kariyasa Adnyana. Menurut Kariyasa Adnyana, selama masa reses di Dapil Buleleng, dirinya banyak mendapat pertanyaan masyarakat

terkait masalah bansos yang belum cair.

"Kita harus jelaskan supaya tidak menjadi simpangsiur informasinya. Kita jelaskan aturannya, yang memang ada perubahan dibanding sebelumnya. Ini penting. Jadi, masa reses ini juga kesempatan kita untuk menjelaskan urusan bansos," ujar politisi PDIP asal Busungbiu, Buleleng yang juga Ketua Pansus APBD 2016 DPRD Bali ini.

Sebagai Ketua Pansus APBD 2016 yang memegang seluk-beluk pembahasan anggaran di Dewan, Kariyasa Adnyana mengaku belum mendapatkan informasi yang valid dari eksekutif. Semua disampaikan masih dalam proses. "Kata eksekutif (Gubernur), saat ini masih proses verifikasi Pergub di pusat. Ya, kita di Dewan sifatnya hanya menunggu saja," tegas mantan Ketua Komisi IV DPRD Bali 2009-2014 ini.

Kariyasa Adnyana mengatakan, jika bansos yang difasilitasi DPRD Bali senilai total Rp 46 miliar di APBD Perubahan 2015 ini tidak cair, maka akan menjadi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Tidak ada lagi pengajuan susulan. "Habis masa tahun anggaran, ya selesai. Kalau bansos Rp

46 miliar di APBD Perubahan ini tidak cair, jelas akan menjadi Silpa. Itu tidak bisa lagi diotak-atik dan masuk kas daerah," ujar Kariyasa Adnyana.

Sementara itu, hingga Senin sore belum ada kepastian dari eksekutif soal pencairan dana bansos yang difasilitasi 55 anggota Dewan. Bocoran yang diperoleh *NusaBali*, petinggi Pemprov Bali masih berjibaku di Jakarta menanyakan kepastian verifikasi Pergub (Peraturan Gubernur) yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai payung hukum pencairan bansos.

Sayangnya, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tjokorda Ngurah Pemayun, belum bisa dikonfirmasi terkait kepastian pencairan bansos ini. Saat dihubungi melalui telepon, Senin kemarin, terdengar nada sambung, namun Sekda Provinsi Bali

ini: tidak mengangkat ponselnya.

Beberapa waktu lalu, Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menegaskan Dewan bisa mencairkan bansos dengan acuan hukum Perda APBD Perubahan yang sudah diverifikasi Mendagri. Ini jauh lebih memungkinkan, ketimbang menung-

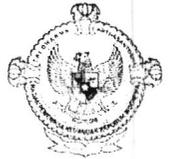
gu payung hukum pencairan bansos melalui Pergub yang masih diajukan ke Mendagri.

Adi Wiryatama menegaskan, demi bisa cairnya bansos dan hibah ini, 55 anggota DPRD Bali nanti harus juga siap tanggung risikonya. "Bagi saya, kalau tidak berani bela rakyat dengan segala risikonya, lebih baik mundur saja. Hari ini (kemarin) saya telepon Mendagri Pak Tjahjo Kumolo, tapi katanya belum ada keputusan. Padahal, waktu sudah sangat mepet," ujar politisi senior PDIP yang mantan Bupati Tabanan 2000-2005 dan 2005-2010 ini.

Menurut Adi Wiryatama, payung hukum untuk pencairan bansos bagi rakyat Bali sebenarnya sudah jelas, yani Perda APBD Perubahan 2015. Perda ini adalah lanjutan dari Perda APBD Induk 2015. "Induk bisa cair, ini di tahun yang sama kok tidak bisa cair? Sangat aneh. Nanti kami rancang, Dewan membuat statemen bersama. Kasihan masyarakat menunggu terlalu lama cairnya bansos tersebut," tegas Adi Wiryatama. Saat ini, ada Rp 46 miliar dana bansos yang difasilitasi DPRD Bali dalam APBD Perubahan 2015, yang bisa menjadi Silpa. **nat**

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal : 1 dan 15



RS Bali Mandara Gunakan Sistem Modern

Untuk menjadikan RS Bali Mandara bersistem modern, dibutuhkan anggaran untuk pengadaan alat kesehatan hingga Rp400 miliar.

DENPASAR, NusaBali

Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan Rumah Sakit Bali Mandara yang saat ini tengah dalam proses pembangunan, dari sisi pelayanan dan penggunaan peralatannya dirancang menggunakan sistem modern.

"Rumah sakit ini integrated, jadi bukan terdiri dari gedung-gedung yang jauh-jauh. Ini sudah dilakukan studi yang komprehensif mengenai sistem pelayanan rumah sakit yang modern, sehingga benar-benar integrated di sana," kata Pastika, di Denpasar, Senin (26/10).

Menurut dia, kalau masih ada pasien yang wara-wiri didorong bawa infus dan pasien yang harus membawa hasil rontgen kemana-mana, bukanlah mencerminkan sistem pelayanan RS yang modern. "Itulah bedanya nanti, RS ini (RS Bali Mandara-red) modern, artinya menganut sistem peralatan modern," ucapnya.

Untuk mendukung cita-cita menjadikan RS Bali Mandara bersistem modern, Pastika mengatakan dibutuhkan anggaran



• IST
GUBERNUR Pastika saat meninjau lokasi RS Bali Mandara di Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar, beberapa waktu lalu.

untuk pengadaan alat kesehatan hingga Rp400 miliar.

Pemprov Bali, ucap dia, sebelumnya sudah sempat meminta kepada pemerintah pusat untuk membantu pengadaan alat kesehatan dan dijanjikan akan mendapatkan dana dari APBN Rp150 miliar. "Sudah disepakati sebagian oleh Bappenas, tetapi belum oleh Kementerian Kesehatan. Kalau memang sudah bisa dipastikan sebagian oleh APBN, maka sisanya harus disiapkan APBD," ujar Pastika.

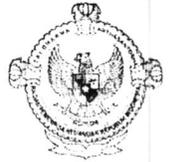
Di sisi lain, mantan Kapolda Bali ini mengatakan, pertengahan tahun 2016 akan dimulai proses mendesain berbagai jenis kamar di RS Bali Mandara. Dia mengingatkan bahwa ketika mulai mendesain ka-

mar, terutama kamar operasi, ruang rontgen dan sebagainya tentu harus disesuaikan dengan alat kesehatan yang dipasang.

Sedangkan untuk manajemen pengelolaan RS yang berlokasi di Jalan By Pass Ngurah Rai, Denpasar, itu akan menggunakan sistem lelang dengan mengundang berbagai pihak. Pastika menambahkan untuk layanan pengobatan penyakit yang akan menjadi unggulan di RS Bali Mandara hingga saat ini belum diputuskan. "Kita harus ada survei pasar dulu, apakah ini cenderung untuk pengobatan penyakit degeneratif ataukah penyakit-penyakit yang lain, misalnya anti-aging, jantung, ginekolog, dan sebagainya. Itu belum kita tentukan," ucapnya. ant, isu

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal : 3



LINTAS

Soal Mobil Dinas, Dewan Sebut Hak

SINGARAJA, NusaBali

Lembaga DPRD Buleleng menolak jika pengadaan fasilitas mobil dinas bagi seluruh anggota disebut sebagai keinginan. Mereka menyebut, pengadaan fasilitas mobil dinas itu adalah bagian dari kewajiban Pemkab.

"Kami ini kan pejabat daerah juga, terus apa bedanya dengan pejabat daerah lainnya yang sudah mendapat fasilitas mobil dinas. Catat itu, pengadaan mobil dinas bagi anggota bukan keinginan kami, tapi itu adalah hak untuk seorang pejabat daerah," kata salah satu anggota Badan Anggaran (Bangar) DPRD Buleleng, I Putu Tirta Adnyana, ketika membahas rancangan APBD Induk 2016 bersama tim anggaran eksekutif, Senin (26/10) di ruang rapat komisi.

Menurut Tirta Adnyana, karena ada regulasi itulah, pihaknya mewacanakan pengadaan mobil dinas itu agar menjadi sebuah pemikiran bagi Pemkab kedepannya. "Ini kan baru sebatas wacana, bukan berarti harus terpenuhi, karena kami juga menyadari kondisi keuangan saat ini, tapi paling tidak apa yang kami sampaikan itu adalah sebuah pemikiran bagi Pemkab ditahun berikutnya," tegas politisi Partai Golkar asal Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula ini.

Tirta Adnyana juga mengaku kecewa, karena pengadaan mobil dinas yang semestinya menjadi rahasia internal justru bocor ke awak media. Apalagi itu baru sebatas wacana dan belum tentu bisa diakomodir dalam APBD.

Sementara Sekkab Buleleng Dewa Ketut Puspaka menegaskan, bahwa pengadaan mobil dinas bagi anggota dewan belumlah final. Pengadaan mobil dinas bagi anggota dewan itu baru sebatas wacana. "Kita tegaskan dalam rancangan APBD belum ada pos pengadaan mobil dinas, ini baru sebatas wacana. Nanti kami akan bicara lagi dengan awak media," jelasnya.

Sementara, Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (Forkomdes) Kabupaten Buleleng I Made Suteja jika pengadaan mobil dinas bagi anggota DPRD Buleleng itu baru sebatas wacana sebaiknya dibahas secara detail. Bahkan, jika perlu dilakukan survey dengan penyebaran kuisioner di masyarakat untuk mencari masukan terhadap rencana tersebut. Apalagi wacana itu berkembang dengan pemangkasan jatah bantuan social bagi anggota dewan. " k19

Edisi : Selasa, 27 Oktober 2015

Hal : 4